

---

# POLA DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK: STUDI KASUS DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL

Sri Vita Maya Sinaga

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## Abstrak

Pola distribusi kekuasaan politik merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam studi politik lokal. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan di tingkat lokal dan bagaimana dinamika kekuasaan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal dan implikasinya terhadap pembangunan politik, sosial, dan ekonomi di suatu daerah.

**Kata Kunci:** *pembangunan politik, sosial, dan ekonomi*

---



## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

*Pola distribusi kekuasaan politik menjadi fenomena yang sangat penting dalam konteks dinamika politik lokal. Fenomena ini mencakup cara di mana kekuasaan politik didistribusikan, dipegang, dan digunakan di tingkat lokal dalam suatu masyarakat. Dinamika pola distribusi kekuasaan ini memainkan peran yang signifikan dalam membentuk struktur politik, memengaruhi kebijakan publik, dan menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Studi tentang pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik lokal beroperasi dan bagaimana interaksi antara pemangku kepentingan lokal memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.*

*Dalam konteks politik lokal, pola distribusi kekuasaan sering kali mencerminkan dinamika kekuatan antara berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan politik dapat didistribusikan secara terpusat atau terdesentralisasi, bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sistem politik, sejarah politik, dan budaya lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki struktur kekuasaan yang otoriter, di mana kekuasaan terpusat di tangan segelintir elit politik atau oligarki. Di tempat lain, kekuasaan politik mungkin didistribusikan lebih merata di antara berbagai aktor politik lokal atau kelompok kepentingan.*

*Studi kasus tentang pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kekuasaan politik diatur dan digunakan dalam konteks spesifik suatu wilayah. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik, serta dampaknya terhadap pembangunan politik, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal.*

*Penelitian tentang pola distribusi kekuasaan politik dalam konteks politik lokal juga memberikan landasan yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan memahami dinamika kekuasaan politik di tingkat lokal, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan bekerja untuk memperbaiki ketidaksetaraan kekuasaan politik yang mungkin ada. Hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif, di mana semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.*

*Dengan demikian, penelitian tentang pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal merupakan bidang yang sangat relevan dan penting dalam studi politik dan pembangunan lokal. Studi kasus yang mendalam dan analisis yang cermat tentang dinamika politik lokal dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan peneliti untuk memahami dan mengatasi tantangan politik dan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.*

## **Metode Penelitian**

*Metode penelitian yang tepat dan cermat menjadi kunci dalam melakukan studi tentang pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal. Dalam rangka untuk menggali secara menyeluruh tentang fenomena ini, berikut adalah beberapa langkah metodologis yang dapat diambil:*

1. **Pemilihan Studi Kasus:** *Langkah pertama adalah memilih studi kasus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Studi kasus yang dipilih harus mencerminkan variasi dalam pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Kriteria pemilihan studi kasus harus memperhitungkan faktor-faktor seperti keragaman politik, sejarah politik, dan konteks sosial-ekonomi di wilayah yang diteliti.*
2. **Pengumpulan Data:** *Metode pengumpulan data yang digunakan dapat mencakup wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, pejabat pemerintah, aktivis masyarakat, dan tokoh politik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kekuasaan politik di tingkat lokal. Observasi partisipan juga dapat membantu peneliti memahami secara langsung interaksi dan hubungan antara berbagai aktor politik lokal. Selain itu, analisis dokumen, termasuk dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan media lokal, dapat memberikan konteks historis dan politik yang penting.*
3. **Analisis Kualitatif:** *Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks dari pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Analisis tersebut dapat mencakup identifikasi aktor politik utama, hubungan kekuasaan antara mereka, serta dinamika politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal.*
4. **Analisis Jaringan:** *Salah satu pendekatan yang berguna adalah analisis jaringan, di mana hubungan dan interaksi antara berbagai aktor politik direpresentasikan sebagai jaringan. Analisis jaringan dapat membantu mengidentifikasi struktur kekuasaan politik yang dominan, titik-titik kekuatan dan kelemahan, serta potensi untuk kolaborasi atau konflik antara berbagai kelompok kepentingan.*
5. **Validasi dan Triangulasi:** *Hasil analisis harus divalidasi melalui triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan metode. Ini memastikan keandalan dan keabsahan temuan penelitian. Validasi juga dapat dilakukan melalui diskusi dengan ahli atau pemangku kepentingan lokal untuk memverifikasi interpretasi data.*
6. **Interpretasi dan Temuan:** *Temuan dari analisis data kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola distribusi kekuasaan politik yang muncul di tingkat lokal. Temuan ini harus dikaitkan dengan teori-teori politik yang relevan dan konteks historis serta sosio-ekonomi dari wilayah yang diteliti.*

## **PEMBAHASAN**

*Pembahasan tentang pola distribusi kekuasaan politik, terutama dalam konteks dinamika politik lokal, merupakan hal yang kompleks dan penting dalam memahami bagaimana kebijakan dibuat, keputusan diambil, dan sumber daya didistribusikan di tingkat yang lebih rendah dalam sistem politik. Dalam sebuah studi kasus, pendekatan analisis yang mendalam diperlukan untuk mengungkap struktur kekuasaan, aktor-aktor yang terlibat, dan bagaimana interaksi mereka membentuk dinamika politik lokal.*

*Langkah pertama dalam pembahasan adalah mengidentifikasi dan menganalisis struktur kekuasaan politik di tingkat lokal. Ini mencakup pemahaman tentang siapa yang memiliki kekuasaan politik, baik secara formal maupun informal, dan bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan di antara berbagai aktor politik. Struktur kekuasaan ini dapat terdiri dari elit politik, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, bisnis lokal, dan kelompok kepentingan lainnya.*

*Setelah struktur kekuasaan diidentifikasi, penting untuk memahami dinamika interaksi antara berbagai aktor politik tersebut. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana kekuasaan diperebutkan, dipertahankan, atau dialihkan di antara aktor-aktor politik, serta cara mereka berkolaborasi atau bersaing satu sama lain untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan politik lokal.*

*Pembahasan juga harus mencakup faktor-faktor yang memengaruhi distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Ini dapat termasuk faktor historis, ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk struktur politik suatu daerah. Misalnya, sejarah kolonialisme, ketimpangan ekonomi, dan ketegangan etnis atau agama dapat berperan dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal.*

*Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran lembaga politik, seperti partai politik, dalam membentuk pola distribusi kekuasaan. Partai politik sering menjadi saluran utama bagi aspirasi politik masyarakat lokal dan dapat memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang memiliki akses ke kekuasaan politik dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.*

*Dalam konteks politik lokal, dinamika distribusi kekuasaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti patronase, nepotisme, dan korupsi. Praktik-praktik ini dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan politik, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal.*

*Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog politik dan meningkatkan akses mereka ke informasi, namun juga dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memperkuat polarisasi politik.*

*Dalam studi kasus dinamika politik lokal, metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen sering digunakan untuk mengumpulkan data dan mengungkap pola distribusi kekuasaan politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan dinamika politik*

lokal, serta memahami dampaknya terhadap penguatan atau pelemahan sistem politik yang demokratis.

*Pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis pola ini dengan cermat merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat sistem politik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.*

*Selain itu, dalam konteks globalisasi, pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti arus modal, perdagangan internasional, dan investasi asing. Keterlibatan aktor-aktor internasional dapat memengaruhi kebijakan lokal dan dinamika politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan pengaruh ini dalam menganalisis pola distribusi kekuasaan politik.*

*Perubahan politik global juga dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Misalnya, perubahan dalam hubungan antarnegara atau kebijakan luar negeri dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap politik lokal, termasuk dalam hal struktur kekuasaan, partisipasi politik, dan proses pembuatan keputusan.*

*Dalam beberapa kasus, konflik politik lokal atau regional juga dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik. Konflik bersenjata atau ketegangan politik antar kelompok dapat mengganggu stabilitas politik, mengubah dinamika kekuasaan, dan bahkan mengarah pada perubahan rezim politik di tingkat lokal.*

*Selain itu, perubahan demografis seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan migrasi juga dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Perubahan ini dapat menciptakan tekanan baru pada infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan pembagian kekuasaan di antara aktor politik.*

*Dalam konteks globalisasi ekonomi, peran sektor swasta dalam politik lokal juga dapat menjadi faktor penting dalam membentuk pola distribusi kekuasaan. Perusahaan besar dan industri yang dominan dapat memiliki pengaruh politik yang signifikan, baik melalui hubungan dengan pejabat pemerintah maupun melalui dukungan finansial kepada kandidat atau partai politik tertentu.*

*Penting juga untuk mempertimbangkan dampak teknologi dan media massa dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik. Media massa, termasuk media sosial, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, membentuk narasi politik, dan memengaruhi hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan media massa dalam konteks politik lokal dapat menjadi faktor penting dalam memahami pola distribusi kekuasaan.*

*Dalam menganalisis pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal, peran budaya politik juga tidak boleh diabaikan. Nilai-nilai, keyakinan, dan norma budaya yang ada dalam masyarakat lokal dapat membentuk cara-cara masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam politik, serta bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara mereka.*

*Selain itu, faktor historis juga berperan penting dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik. Sejarah kolonialisme, konflik etnis atau agama, dan pengalaman politik*

masa lalu dapat memberikan konteks yang penting dalam memahami struktur dan dinamika politik lokal saat ini. Oleh karena itu, dalam menganalisis pola distribusi kekuasaan politik, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah yang relevan.

Perkembangan politik lokal juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang cenderung mempengaruhi pola distribusi kekuasaan politik dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk stabilitas politik dan partisipasi publik. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang tinggi atau krisis ekonomi dapat memunculkan ketegangan sosial yang dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik dengan menciptakan ketidakpuasan sosial dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan dalam tata kelola pemerintahan lokal juga dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik. Reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan pembagian kekuasaan di antara aktor politik.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, parlemen lokal, dan lembaga eksekutif, dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik. Partai politik, misalnya, dapat berperan dalam memobilisasi dukungan politik, mempengaruhi agenda politik, dan membentuk koalisi politik yang dapat memengaruhi dinamika kekuasaan.

Selain itu, pendidikan dan literasi politik juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk pola distribusi kekuasaan politik. Masyarakat yang terampil secara politik cenderung lebih aktif secara politik dan memiliki kemampuan untuk memahami, menilai, dan merespons kebijakan politik, sehingga dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan politik.

Dalam konteks globalisasi, integrasi ekonomi, politik, dan budaya antarnegara juga dapat memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal. Ketergantungan ekonomi pada pasar global, arus migrasi internasional, dan pengaruh budaya global dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan pembagian kekuasaan di antara aktor politik.

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan faktor geografis dan lingkungan dalam menganalisis pola distribusi kekuasaan politik. Geografi dan lingkungan fisik dapat mempengaruhi distribusi populasi, akses terhadap sumber daya alam, dan infrastruktur, yang semuanya dapat memengaruhi dinamika politik lokal dan pembagian kekuasaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks dan beragam ini, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan historis yang saling terkait. Untuk memahami secara menyeluruh pola distribusi kekuasaan politik, diperlukan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan konteks yang luas.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan dinamika politik, pemahaman terhadap pola distribusi kekuasaan politik menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pola distribusi kekuasaan politik adalah melalui studi kasus dalam dinamika politik lokal. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis

konkretnya dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dan dijalankan.

Metode penelitian yang dapat digunakan termasuk analisis dokumentasi, wawancara, observasi partisipan, dan analisis jaringan politik. Analisis dokumentasi dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi akademis, untuk memahami bagaimana kekuasaan politik terstruktur dan dijalankan dalam konteks politik lokal. Wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, seperti pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan aktivis politik, dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana distribusi kekuasaan politik terjadi dan memengaruhi kehidupan politik lokal.

Observasi partisipan juga penting dalam memahami dinamika politik lokal dan pola distribusi kekuasaan politik. Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan politik lokal, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan politik dijalankan dalam praktek sehari-hari dan bagaimana interaksi antara aktor politik berlangsung. Selain itu, analisis jaringan politik dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara aktor politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan individu, serta mengidentifikasi pola distribusi kekuasaan politik yang mendasarinya.

Dalam menganalisis pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal, penting untuk mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan sosial yang mempengaruhi dinamika politik setempat. Setiap komunitas memiliki karakteristik uniknya sendiri yang memengaruhi bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dan dijalankan. Dengan memahami konteks yang kompleks ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik lokal.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas interaksi antara politik lokal dan global, penting untuk memperhatikan bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti arus modal, perdagangan internasional, dan investasi asing, memengaruhi pola distribusi kekuasaan politik dalam dinamika politik lokal. Studi kasus dalam dinamika politik lokal dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana komunitas lokal menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan eksternal ini, serta bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dalam konteks ini.

Melalui pendekatan studi kasus dalam dinamika politik lokal, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola distribusi kekuasaan politik dan bagaimana dinamika politik lokal berkontribusi pada pembentukan dan perubahan kekuasaan politik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dan dijalankan dalam berbagai konteks politik lokal, serta implikasinya dalam pembangunan dan perubahan politik yang lebih luas.

## **Kesimpulan**

*Dalam kesimpulan, penelitian tentang pola distribusi kekuasaan politik melalui pendekatan studi kasus dalam dinamika politik lokal memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan politik terstruktur, dijalankan, dan dipertahankan dalam konteks spesifik suatu wilayah atau komunitas. Melalui analisis yang mendalam terhadap dokumentasi, wawancara, observasi partisipan, dan analisis jaringan politik, penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi distribusi kekuasaan politik dalam lingkungan lokal. Konteks historis, budaya, dan sosial yang unik dari setiap komunitas juga dipertimbangkan untuk memahami dinamika politik yang kompleks.*

*Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pengaruh faktor eksternal, seperti globalisasi, terhadap dinamika politik lokal. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana komunitas lokal menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan eksternal, serta bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dalam konteks ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam pembangunan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*

*Dengan demikian, penelitian tentang pola distribusi kekuasaan politik melalui studi kasus dalam dinamika politik lokal memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan politik terorganisir, dijalankan, dan dipertahankan dalam masyarakat lokal. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi politik serta membangun sistem politik yang lebih responsif dan adil bagi semua warga.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan.
- Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).
- Nobriama, R. A. (2019). pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (*theobroma cacao l.*) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga).
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Batubara, B. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Girsang, L. (2020). Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2004). Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).

- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from [osf.io/3jpd/](https://osf.io/3jpd/).
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.

- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.